

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Penyusunan Renja 2024 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- peraturan bupati probolinggo nomor : 50 tahun 2022 tentang rencana kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten probolinggo

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 2025 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Memuat Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2024 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten

Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;

4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2023), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SAMPAI TW II

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian SAMPAI TW II

Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk mengukur tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan secara periodik. Tercapainya atau tidaknya target pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun dapat diketahui Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka RENJA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian selama tahun 2024 sampai triwulan II bulan Juni. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan TW II

kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian (Program dan Kegiatan s.d Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	<u>Nilai Sakip Perangkat Daerah</u>	75 nilai		

	<u>KABUPATEN/KOTA</u>				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan	19 Dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan		
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</i>	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang	4 Dokumen		

	<i>Daerah</i>	disusun dan dilaporkan tepat waktu			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		
	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu	21 Dokumen		
	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		
	<i>Administrasi Umum Perangkat</i>	Prosentase pemenuhan administrasi umum	100%		

	<i>Daerah</i>	PD			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	50%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		

	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	150 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit		

	Mesin Lainnya	yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	1 Unit		
	<u>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</u>	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP	94 persentase	0	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha	30%	0	
	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	0	
	<u>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</u>	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	82% persentase	60%	75%

	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	82 %	60%	75%
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	30	75%
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	12	40%
	<u>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</u>	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	92 persentase		
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah</i>	Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	82 %		

	<i>Kabupaten/Kota</i>				
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	12	40%
	<u>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN</u>	Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya	75 persentase		
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	25%		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	30	12,5%
	<u>PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI</u>	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	25 persentase		
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	35 Unit Usaha	15	42,86%

	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha		
	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</u>	Peresentase UM yang meningkat omzetnya	5 persentase		
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	500 Unit Usaha		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	105 Unit Usaha		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7800 Unit Usaha		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80 Unit Usaha		

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400 Orang		
	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</u>	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 persentase		
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	Jumlah Usaha mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	1 Unit Usaha		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	65 Unit Usaha		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	<u>PROGRAM PERIZINAN DAN</u>	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	20 persentase		

	<u>PENDAFTARAN PERUSAHAAN</u>				
	<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	5 Unit Usaha	3 Gudang	60%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	3 Rekomendasi TDG	60%
	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</u>	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI	5.71 persentase	0	0 %
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	5 Unit	0 Unit Kegiatan Pemeliharaan Terdampak refocusing anggaran	0 %
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35 Unit	0 Unit	0%
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	35 pengelola	18 Pengelola	51,4 %
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 Dokumen	18 Pengelola	51,4 %

	<u>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</u> <i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	61.11 persentase 11 komoditas		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	180 Laporan	49,31%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	2 Laporan	40%
	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	72 kali	10 kali	14%

	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12 Dokumen	0	0%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan	10 kali	14%
	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</u>	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah	83.33 persentase		
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	30 produk	41 produk	136%
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	10 pelaku usaha (pameran Inacraft 2024)	200%
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	31 pelaku usaha (30 pelaku usaha mengikuti kurasi produk	206%

				ekspor dengan Expor Center Surabaya, 1 pelaku usaha mengikuti misi dagang dengan Provinsi Bali)	
	<u>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</u>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah yang berlaku	95 persentase		
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	50%	9,49 %	18,98
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10600 Unit	1.006 unit	9,49%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2050 Orang	521 orang	25,41%
	<u>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</u>	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	83.33 persentase		
	<i>Pelaksanaan</i>	Jumlah produk	30 produk		

	<i>Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	unggulan daerah yang difasilitasi promosi			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	Baru akan dilaksanakan di Bulan Juli Kemitraan dengan Alfamart	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	<u>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</u>	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan	50 persen	0 persen	
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan	50%	0%	
	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	1 Dokumen	0 dokumen	

	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	0 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	0 dokumen	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0 dokumen	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	0	4 Dokumen	0 dokumen	

		0	0 Dokumen		
	<u>PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI</u>	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan	20 persentase	2 persentase	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	50 Unit Usaha	0 unit usaha	
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0 dokumen	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar	50 Dokumen	5 dokumen	

	dar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
	<u>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</u>	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas	25 persentase	2 persentase	
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	80 Unit Usaha	0 Unit Usaha	

	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 Dokumen	0 dokumen	
	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	0 dokumen	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	20 Dokumen	8 dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SAMPAI TW 2

No	Indikator	Target Kinerja Capaian RENSTRA	Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun berjalan	Catatan Analisis
1				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro melalui Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan produktivitas baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk, Peningkatan akses pemasaran baik secara online maupun offline serta Penguatan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan (swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah), Peningkatan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok.
3. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan tertib niaga berupa Penertiban Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus.
4. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara-hilir), Pengendalian Legalitas Usaha Industri, optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri serta penguatan sistem informasi dan data industri

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
- 3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dan kedua dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
- 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
- 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas

layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);

- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
- 3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Perdagangan mendukung agenda pertama dan ketiga dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
 2. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
 3. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara diluar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan PerjanjianKerjasama Perdagangan Internasional yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang;

2. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) /Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
 2. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok;
 2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok; dan
 3. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan edukasi konsumen; dan
 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen;
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; dan
 2. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan
 2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK melalui: (i) peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi; (ii) peningkatan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK; (iii) peningkatan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK; dan (iv) xc/SRG dan PLK

9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 2. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 4. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 5. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan;
 6. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta
 7. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
 1. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; serta
 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
 1. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan; serta
 2. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.
 1. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;
 2. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
 3. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
 4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
- 3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Perindustrian mendukung agenda pertama dan ketiga dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
 2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 3. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup;
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 2. meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 4. memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 5. mengembangkan industri halal;
- c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 2. meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 3. mengelola impor;
 4. meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 5. meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 1. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 2. meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan
 3. meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata.

- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry
 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Targe t
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Meningkatkan Kesempatan Kerja di Dukungan Infrastruktur Berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi berbasis Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan omzet koperasi dan Usaha Mikro	$\frac{\text{Omzet Usaha Mikro tahun N} - \text{Omzet Usaha Mikro tahun N-1}}{\text{Omzet Koperasi tahun N-1}} \times 100$	
			Persentase pertumbuhan omzet UM	$\frac{\text{Omzet Usaha Mikro tahun N} - \text{Omzet Usaha Mikro tahun N-1}}{\text{Omzet Usaha Mikro tahun N-1}} \times 100$	
			Meningkatnya PDRB	$\frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB}} \times 100$	

			Sub Sektor Perdagangan	Jumlah Total PDRB	
			Meningkat nya PDRB Sub Sektor Industri	Kontribusi PDRB sektor Industri Jumlah Total PDRB	X 100

1.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Perumusan rencana kerja program, kegiatan hingga subkegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, pencapaian Renstra serta Visi misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Probolinggo. Program kerja utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang selaras dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja:

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD:
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota :

- Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

IV. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian :

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

VII. Program Pengembangan UMKM :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil :

- Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

VIII. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan:

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

IX. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya:

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

X. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

XI. Program Pengembangan Ekspor:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
- Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

XII. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

XIII. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:

- Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

XIV. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri:

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

XV. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

XVI. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota:

- Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

- Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

TABEL 3.1
RINCIAN PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, TARGET, PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2024

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU		KE T
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SESUDAH	SEBELUM	SEBELUM	SESUDAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH						18.467.317.426	17.821.841.726	645.475.700
	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</u>	<u>Nilai Sakip Perangkat Daerah</u>	<u>Nilai Sakip Perangkat Daerah</u>	75 nilai	75 nilai	17.797.317.426	17.350.511.426	446.806.000

	<u>AHAN</u> <u>DAERAH</u> <u>KABUPAT</u> <u>EN/KOTA</u>	<u>DAERAH</u> <u>KABUPATE</u> <u>N/KOTA</u>								
	<i>Perencanaa n, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokume n	21 Dokume n	190.000.0 00	190.000.00 0	0	
	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokume n	9 Dokume n	115.000.0 00	115.000.00 0	0	
	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	11 Laporan	11 Laporan	75.000.00 0	75.000.000	0	

	SKPD	SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan	19 Dokumen	19 Dokumen	13.317.673.898	13.317.673.898	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	13.262.673.898	13.262.673.898	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	19 Laporan	19 Laporan	55.000.000	55.000.000	0	

	SKPD	SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	35.000.000	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	35.000.000	0	
	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat</i>	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat</i>	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan	21 Dokumen	21 Dokumen	80.000.000	80.000.000	0	

	<i>Daerah</i>	<i>Daerah</i>	waktu	tepat waktu						
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	80.000.000	80.000.000	0	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					0	0	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	

	Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	0	0	0	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Prosentase pemenuhan administrasi umum PD	Prosentase pemenuhan administrasi umum PD	100%	100%	123.271.200	120.742.900	2.528.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	123.271.200	120.742.900	2.528.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	0	0	
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	50%	50%	248.282.200	248.282.200	0	

	<i>Daerah</i>									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	248.282.200	248.282.200	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0	0	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	12 laporan	12 laporan	3.504.270.128	3.114.142.428	390.127.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	12 laporan	135.425.146	135.297.681	127.465	

	, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	30.504.00 0	15.504.000	15.000.0 00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3.338.340 .982	2.963.340. 747,00	375.000. 235	
	<i>Pemelihara an Barang Milik Daerah</i>	<i>Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	150 Unit	150 Unit	298.820.0 00	244.670.00 0	54.150.0 00	

	<i>Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah</i>	<i>Urusan Pemerintah an Daerah</i>	Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	108.000.000	78.500.000	29.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	72.050.000	50.420.000	21.630.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit	1 Unit	118.770.000	115.750.000	3.020.000	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi						
	<u>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</u>	<u>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</u>	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP	94 persentase	94 persentase	0	0	0	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha	Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha	30%	30%	0	0	0	

	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0	0	0	
	<u>PROGRAM PENGAWA SAN DAN</u>	<u>PROGRAM PENGAWA SAN DAN</u>	Persentase Koperasi yang patuh terhadap	Persentase Koperasi yang patuh	82 persenta	82 persenta	80.000.000	63.585.000	16.415.000	

	<u>PEMERIKSAAN KOPERASI</u>	<u>PEMERIKSAAN KOPERASI</u>	peraturan perundang-undangan	terhadap peraturan perundang-undangan	se	se				
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	82 %	82 %	80.000.000	63.585.000	16.415.000	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	35.000.000	25.470.000	9.530.000	

			Kelembagaan Koperasi	Kelola Kelembagaan Koperasi						
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	45.000.000	38.115.000	6.885.000	
	<u>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</u>	<u>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</u>	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	92 persentase	92 persentase	25.000.000	14.160.000	10.840.000	
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan</i>	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan</i>	Persentase koperasi yang telah dinilai status	Persentase koperasi yang telah dinilai status	82 %	82 %	25.000.000	14.160.000	10.840.000	

	<i>Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	kesehatannya	kesehatannya						
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	25.000.000	14.160.000	10.840.000	
	<u>PROGRAM PENDIDIK</u>	<u>PROGRAM PENDIDIKA</u>	Persentase Kualitas Koperasi	Persentase Kualitas	75 persenta	75 persenta	105.000.000	75.598.500	29.401.500	

	<u>AN DAN LATIHAN PERKOPE RASIAN</u>	<u>N DAN LATIHAN PERKOPE RASIAN</u>	yang meningkat kapasitas SDMnya	Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya	se	se				
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	25%	25%	105.000.000	75.598.500	29.401.500	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasi an serta Kapasitas dan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasi an serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	240 Orang	105.000.000	75.598.500	29.401.500	

	Kompetensi SDM Koperasi	SDM Koperasi								
	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</u>	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</u>	Persentase koperasi yang meningkat volume usahnya	Persentase koperasi yang meningkat volume usahnya	25 persentase	25 persentase	125.000.000	75.344.000	49.656.000	
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	125.000.000	75.344.000	49.656.000	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	125.000.000	75.344.000	49.656.000	

	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		ta						
	<u>PROGRAM PEMBERD AYAAN USAHA MENENGA H, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</u>	<u>PROGRAM PEMBERD AYAAN USAHA MENENGA H, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</u>	Peresentase UM yang meningkat omzetnya	Peresentase UM yang meningkat omzetnya	5 persenta se	5 persenta se	110.000.0 00	90.544.800	19.455.2 00	
	<i>Pemberday aan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembaga an dan Koordinasi</i>	<i>Pemberday aan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembaga an dan Koordinasi</i>	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	110.000.0 00	90.544.800	19.455.2 00	

	<i>dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Pemangku Kepentingan	dengan Para Pemangku Kepentingan						
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	20.000.000	0	0	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7800 Unit Usaha	7800 Unit Usaha	20.000.000	8.244.800	11.755.200	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	0	0	0	

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400 Orang	400 Orang	70.000.000	62.300.000	7.700.000	
	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</u>	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</u>	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 persentase	1 persentase	225.000.000	152.100.000	72.900.000	
	<i>Pengembangan</i>	<i>Pengembangan</i>	Jumlah Usaha	Jumlah Usaha	1 Unit	1 Unit	225.000.0	152.100.00	72.900.0	

	<i>gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	Usaha	Usaha	00	0	00	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	225.000.000	152.100.000	72.900.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						1.220.608.800	3.834.623.500	2.614.014.700	

	PERDAGANGAN									
	<u>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</u>	<u>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</u>	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	20 persentase	20 persentase	6.150.000	6.150.000	0	
	<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	6.150.000	6.150.000	0	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	5 Dokumen	6.150.000	6.150.000	0	
	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</u>	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</u>	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar	5.71 persentase	5.71 persentase	361.193.000	1.148.732.000	787.539.000	

	<u>PERDAGANGAN</u>	<u>PERDAGANGAN</u>	SNI	SNI						
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	5 Unit	5 Unit	180.429.000	992.968.000	812.539.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35 Unit	35 Unit	180.429.000	992.968.000	812.539.000	
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaa	35 pengelola	35 pengelola	180.764.000	155.764.000	25.000.000	

				n						
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 Dokumen	35 Dokumen	180.764.000	155.764.000	25.000.000	
	<u>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</u>	<u>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</u>	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	61.11 persentase	61.11 persentase	123.495.000	2.113.495.000	1.990.000.000	
	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan</i>	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan</i>	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	11 komoditas	11 komoditas	109.979.600	210.197.600	100.218.000	

	<i>Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	yang dikendalikan	Penting yang dikendalikan						
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	365 Laporan	8.000.000	3.520.000	4.480.000	
	Pelaksanaan Operasi	Pelaksanaan Operasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	101.979.600	2.098.459.600	1.996.480.000	

	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	72 kali	72 kali	13.515.400	11.515.400	2.000.000	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	

	Pengawasan n Penyaluran dan Penggunaan n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan n Penyaluran dan Penggunaan n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan	72 Laporan	13.515.40 0	11.515.400	2.000.00 0	
	<u>PROGRAM PENGEMB ANGAN EKSPOR</u>	<u>PROGRAM PENGEMB ANGAN EKSPOR</u>	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah	83.33 persenta se	83.33 persenta se	208.485.0 00	133.485.00 0	75.000.0 00	
	<i>Penyelengg araan Promosi Dagang Melalui Pameran</i>	<i>Penyelengg araan Promosi Dagang Melalui Pameran</i>	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	30 produk	30 produk	208.485.0 00	133.485.00 0	75.000.0 00	

	<i>Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>								
	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	154.180.000	86.180.000	68.000.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	54.305.000	47.305.000	7.000.000	

	<u>PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDU NGAN KONSUME N</u>	<u>PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDU NGAN KONSUME N</u>	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	95 persenta se	95 persenta se	231.442.8 00	157.994.50 0	73.448.3 00	
	<i>Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasa n</i>	<i>Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasa n</i>	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	50%	50%	231.442.8 00	157.994.50 0	73.448.3 00	
	Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10600 Unit	10600 Unit	0	0	0	
	Pengawasa n/Penyuluh	Pengawasa n/Penyuluha	Jumlah Pelaku Usaha di	Jumlah Pelaku Usaha di	2050	2050	74.275.00	38.525.000	35.750.0	

	an Metrologi Legal	n Metrologi Legal	Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	0		00	
	<u>PROGRAM PENGGUN AAN DAN PEMASAR AN PRODUK DALAM NEGERI</u>	<u>PROGRAM PENGGUN AAN DAN PEMASAR AN PRODUK DALAM NEGERI</u>	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	83.33 persenta se	83.33 persenta se	289.843.0 00	274.767.00 0	15.076.0 00	
	<i>Pelaksanaa n Promosi, Pemasaran dan Peningkata n Penggunaa n Produk Dalam Negeri</i>	<i>Pelaksanaa n Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaa n Produk Dalam Negeri</i>	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	30 produk	30 produk	289.843.0 00	274.767.00 0	15.076.0 00	
	Pemasaran dan Peningkata n	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	30 UMKM	30 UMKM	289.843.0 00	274.767.00 0	15.076.0 00	

	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						5.810.284.628	5.810.284.628	0	
	<u>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</u>	<u>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</u>	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan	50 persen	50 persen	5.710.284.268	5.710.284.268	0	
	<i>Penyusunan dan Evaluasi</i>	<i>Penyusunan dan Evaluasi</i>	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan	Persentase Draft Kebijakan	50%	50%	5.710.284.268	5.710.284.268	0	

	<i>Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	Industri yang dihasilkan	Pembangunan Industri yang dihasilkan						
	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.831.701.800	1.831.701.800	0	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	3.878.582.828	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	3 Dokumen	3 Dokumen	3.878.582.828	3.878.582.828	0	

	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Industri	dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	
			0	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	

	<u>PROGRAM PENGEND ALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</u>	<u>PROGRAM PENGEND ALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</u>	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan	20 persenta se	20 persenta se	50.000.00 0	50.000.000	0	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenanga n Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenanga n Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang direkomendasi kan penerbitan ijinnya	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.00 0	50.000.000	0	

	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	0	0	0	
--	--	--	--	---	-----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------	--

				ta						
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas	50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	50.000.000	0	

	Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
	<u>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI</u>	<u>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI</u>	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban	25 persentase	25 persentase	50.000.000	50.000.000	0	

	<u>NASIONAL</u>	<u>NASIONAL</u>	informasi di SIINas	penyampaian informasi di SIINas						
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang terdaftar di SIINAS	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	0	0	0	
	<i>Fasilitasi Pengumpul an, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri</i>	<i>Fasilitasi Pengumpul an, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	10 Dokume n	10 Dokume n	0	0	0	

	<i>serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000	50.000.000	0	

	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						
	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/</i>	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	

	<i>Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Industri Nasional (SIINas)	Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						

TABEL 3.2

MATRIKS RENCANA KERJA KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
*	URUSAN PEMERINTAHAN					

	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	190.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	115.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	75.000.000
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	13.262.673.898
		Koordinasi dan	Jumlah Laporan	19 Laporan	55.000.000	Koordinasi dan

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	35.000.000
		<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19 Dokumen	80.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.742.900
			Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	0 Paket	0

			Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	248.282.200
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	135.297.681
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.504.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.963.340.747,00
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	78.500.000

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	50.420.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.750.000
2	<u>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</u>	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	0
3	<u>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</u>	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang</i>	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	25.470.000

		<i>Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	38.115.000
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	14.160.000
5	<u>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</u>	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan</i>	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	75.598.500

		<i>dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Koperasi			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	75.344.000
7	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</u>	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	105 Unit Usaha	0
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7800 Unit Usaha	8.244.800
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	80 Unit	0

			dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Usaha	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400 Orang	62.300.000
8	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</u>	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	65 Unit Usaha	152.100.000
*	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					

	PERDAGANGAN					
	<u>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</u>	<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	6.150.000
	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</u>	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35 Unit	992.968.000
		<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 Dokumen	155.764.000
	<u>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</u>	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	365 Laporan	3.520.000

				dalam Sistem Informasi Perdagangan		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	2.098.459.600	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12 Dokumen	0
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan	11.515.400
	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN</u>	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang</i>	Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang	5 Pelaku	86.180.000

	<u>EKSPOR</u>	<i>Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Nasional	Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Usaha	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	47.305.000
	<u>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</u>	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10600 Unit	0
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2050 Orang	38.525.000
	<u>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN</u>	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan</i>	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk	30 UMKM	274.767.000

	<u>PRODUK DALAM NEGERI</u>	<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Tingkat Kabupaten/Kota	dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	<u>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</u>	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1.831.701.800

			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	0
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	3.878.582.828
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan	0	4 Dokumen	0

			Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			
				0	0 Dokumen	0
	<u>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</u>	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor	50 Dokumen	50.000.000

			perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan		
--	--	--	---	--	--	--

				pemerintah pusat		
	<u>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</u>	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 Dokumen	0
			<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	0
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	20 Dokumen	50.000.000

			SIINas	Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		
TOTAL				107.758.753.196		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga OPD akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder dan CSR sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan OPD , sedangkan untuk realisasi dari Program- program tersebut erat hubungan dengan sumber pendanaan baik dari APBD maupun APBN dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo, sehingga penetapan prioritas pembangunan pembangunan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi

OPD dapat terkoordinir, terintegrasi dan sinergis, serta berkelanjutan, dengan semua bidang-bidang yang ada di maupun sesama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Probolinggo, 11 Juni 2024

**KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**



TAUFIK AL AMI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001